

STRATEGI CALEG DALAM UPAYA MEMENANGKAN PEMILU LEGISLATIF DI DAPIL II KABUPATEN SUMENEP

Rusnani¹, Bambang Hermanto²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja Sumenep
rusnani08@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja Sumenep
bambanghermanto.febunija@gmail.com

ABSTRAK

Kehidupan demokrasi Indonesia saat ini menganut demokrasi Pancasila yang merupakan perpaduan sistem parlementer dan sistem presidential yang memberikan semangat baru terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia.

Dalam perkembangannya penerapan demokrasi Indonesia telah mendapatkan angin segar setelah memasuki era reformasi pada limabelas tahun terakhir ini, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembenahan-pembenahan konstitusi baik melalui amandemen UUD 1945 ataupun revisi undang-undang yang berkenaan dengan penerapan demokrasi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan caleg dalam memenangkan pemilu legislatif, dan strategi apa saja yang dilakukan. Sedangkan metode penelitiannya adalah kualitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dan sampel sumber data adalah caleg (tim sukses) dan pemilih di dapil II Sumenep.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan para caleg di dapil II pada umumnya adalah politik uang mereka beranggapan dengan memberikan uang akan mendapatkan dukungan yang banyak dari masyarakat.

Kata kunci : Strategi Caleg, Menang dalam Pemilu

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demokrasi mempunyai peranan penting bagi masyarakat yang menerapkannya. Karena dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan hidupnya sesuai dengan prinsip dan pandangan hidup sebagai landasan yang menjadi payung dalam penerapannya pada sebuah negara. Oleh sebab itu demokrasi selalu saja memberikan posisi penting bagi rakyat, walaupun implikasi dan praktek pada masing-masing negara tentu berbeda.

Pada kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini yang menganut demokrasi Pancasila dengan perpaduan sistem parlemen dan presidential

memberikan ruh dan semangat baru terhadap perjalanan penerapan demokrasi di Indonesia. Berbeda dengan era sebelumnya, sejak orde lama yang menggunakan sistem demokrasi terpimpin dengan sedikit mengarah pada pola otoriter penguasa pemerintahan, walaupun juga pada masa perjalanan orde baru demokrasi Pancasila masih saja terpasung oleh kekuatan status quo untuk mempertahankan kekuasaan oleh penguasa.

Dalam perkembangannya penerapan demokrasi di Indonesia telah mendapatkan angin segar setelah memasuki era reformasi pada lima belas tahun terakhir, hal demikian dapat dibuktikan dengan adanya pembenahan-pembenahan konstitusi baik

melalui amandemen UUD 1945 ataupun revisi undang-undang yang berkenaan dengan penerapan demokrasi. Sejarah pernah mencatat bahwa sistim kepartaian pada masa orde baru, partai peserta pemilu sangat begitu ramping, yaitu hanya ada tiga partai pemilu diantaranya adalah Golkar, PDI, dan PPP. Setelah memasuki zaman reformasi, kran demokrasi mulai dibuka selebar-lebarnya sehingga partai politik peserta pemilu bertambah drastis hingga mencapai kurang lebih empat puluh lima partai politik (1999).

Seiring dengan perkembangannya, undang-undang kepemiluan terus diperbaharui dengan dilakukan revisi, salah satu hasil dari revisi tersebut adalah tentang pencalegan (pemilu 2004). Dimana pada pemilu ini menggunakan sistim kompetisi penuh dalam sebuah internal partai tertentu. Pada sistim pemilu 2009 sampai pada pemilu berikutnya terjadi pergeseran paradigma dari pemilu sebelumnya, kalau dilihat pada pemilu sebelumnya partai tertentu sangat mempunyai peranan dalam memenangkan dan menempatkan legislatornya dalam sebuah parlemen. Akan tetapi pada pemilu 2009 sampai pada pemilu 2014 yang baru saja dilaksanakan, peranan calon legislatif sangat besar dalam memenangkan dirinya sebagai anggota legislatif sekaligus juga akan menentukan elektabilitas partai (keterpilihan partai) dalam sebuah pemilu.

Maka berdasar pada perkembangan demokrasi itulah, peneliti bermaksud untuk mendalami lebih jauh bagaimana proses pergeseran paradigma pemilu itu terjadi, yang berpijak pada bagaimana seorang calon anggota legislator menerapkan strategi kemenangan dalam sebuah pemilu. Di samping itu, melalui penelitian ini peneliti juga berusaha untuk mengukur kualitas pemilu yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih berdemokrasi.

Penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan caleg dalam memenangkan pemilu legislative, 2. Strategi apa saja yang dilakukan caleg dalam memenangkan pemilu legislatif Sedangkan luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Strategi yang tepat dan baik dalam kemenangan pemilu
2. Menang sesuai aturan

TINJAUAN PUSTAKA

1. Demokrasi di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan oleh Prof Mahfud MD (2003) yang menyatakan bahwa demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena

kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Pada prinsipnya negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Atau ketika dilihat dari fungsi dan peranannya, merupakan pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat disebabkan kedaulatan ada di tangan rakyat.

Dalam penyelenggaraan negara di Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi seperti telah sedikit disinggung pada latar belakang masalah dalam penelitian ini bahwa ada dua model demokrasi yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diantara masing-masing model keduanya, hidup dalam dua era yang berbeda yaitu demokrasi terpimpin yang hidup pada masa presiden Soekarno (era orde lama) dan demokrasi pancasila yang diterapkan pada masa presiden Soeharto dari era orde baru sampai pada munculnya era reformasi.

a. **Demokrasi Terpimpin**

Konsepsi demokrasi terpimpin muncul pada tahun 1957 setelah dua tahun pemilu pertama 1955. Demokrasi terpimpin dilontarkan oleh presiden Soekarno sebagaimana ditulis oleh Adam Malik dalam otobiografinya (1979). Dalam konsepsi Bung Karno

demokrasi terpimpin yang hendak membawa PKI masuk dalam kabinet juga menyebut-nyebut pembentukan lembaga negara yang di luar konstitusi yaitu membentuk Dewan Nasional yang akan diketuai oleh Soekarno sendiri dengan tugas memberi nasihat pada kabinet. Dengan demikian harus dibentuk kabinet baru yang melibatkan semua partai termasuk PKI serta dibentuk sebuah penasehat tertinggi dengan nama Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil seluruh golongan fungsional.

Demokrasi terpimpin timbul karena telah terjadi perubahan sistem politik dari parlemen yang dapat menekan pemerintah menjadi parlemen yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menjamin pembangunan masyarakat. Parlemen bahkan memberikan kelonggaran-kelonggaran dan memperkuat pemerintah karena parlemen sendiri tidak mungkin dapat mengikuti perkembangan masyarakat modern yang semakin terus dinamis dengan keragaman karakteristik bangsa Indonesia yang sangat kompleks.

Mainstream demokrasi terpimpin ini sebenarnya ingin lebih meningkatkan peranan presiden

dalam merumuskan segala yang menyangkut kepentingan negara, yang mana akibatnya sangat melemahkan fungsi dan peranan parlemen. Penerapan Demokrasi Terpimpin di Indonesia disebabkan oleh faktor dinamika politik yang terjadi krisis. Menurut sejarahnya bahwa ada beberapa partai pada masa orde lama yang menolak terhadap model sistem demokrasi terpimpin ini karena semakin mengarah pada sistem kenegaraan yang otoriter.

Namun ada beberapa alasan yang menguatkan presiden Soekarno dalam menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi Terpimpin lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
2. Dewan perancang nasional akan membuat blue print masyarakat yang adil dan makmur.
3. Lembaga konstituante tidak menjadi tempat berdebat yang berlarut-larut sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas parlemen.
4. Perlu penyederhanaan sistem kepartaian dengan mencabut maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang telah memberi sistem multi partai dan

menggantinya dengan undang-undang kepartaian serta undang-undang pemilu.

b. Demokrasi Pancasila

Demokrasi yang secara resmi mengkristal di dalam UUD 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia biasa disebut “Demokrasi Pancasila”. Meskipun sebenarnya dasar-dasar konstitusional bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana yang berlaku sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965 tetapi istilah “Demokrasi Pancasila” itu baru dipopulerkan sesudah lahir Orde Baru (1966).

Istilah ini lahir sebagai lawan (dilawankan) terhadap istilah “Demokrasi Terpimpin” di bawah pemerintah Soekarno. Sejak tahun 1957/1958 Soekarno mencetuskan ide “Demokrasi Terpimpin” sebagai usaha pemusatan kekuatan berada di tangannya. Gagasan ini kemudian berhasil dibakukan secara yuridis dalam bentuk ketetapan MPRS No. VII/MPRS/1965 tentang “Prinsip-Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan”.

Ketika Orde Baru lahir gagasan

Demokrasi Terpimpin ditolak secara terang-terangan sehingga pada tahun 1968 kembali MPRS mengeluarkan Ketetapan No. XXXVII/MPRS/1968 tentang Pencabutan ketetapan MPRS No.VII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan atau sesuai dengan diktum Tap tersebut tentang Demokrasi Pancasila. Dengan demikian dalam perwujudannya sebagai aturan hukum baik Demokrasi Terpimpin maupun Demokrasi Pancasila itu adalah berisi teknis pelaksanaan pengambilan keputusan dalam permusyawaratan. Menurut Demokrasi Terpimpin inti dari permusyawaratan adalah “musyawarah untuk mufakat” yang bilamana hal itu tidak dapat dicapai maka musyawarah harus menempuh salah satu jalan berikut.

1. Persoalannya diserahkan kepada pemimpin untuk mengambil kebijaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentangan.
2. Persoalannya ditangguhkan.
3. Persoalannya ditiadakan sama sekali.

Sedangkan konsep Demokrasi Pancasila juga mengutamakan musyawarah untuk mufakat, tetapi pemimpin tidak diberi hak untuk mengambil keputusan dalam hal “mufakat bulat” tidak tercapai. Bagi Demokrasi Pancasila sesuai Tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 untuk mengatasi kemacetan karena tidak dapat dicapainya “mufakat bulat” maka jalan voting (pemungutan suara) bisa ditempuh sesuai dengan prosedur yang dikehendaki Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (2) UUD1945. Perumusan Demokrasi Pancasila sebagaimana diatur Tap No. XXXVII/MPRS/1968 yang sekedar mengatur teknis musyawarah ini pada tahun 1973 kembali dicabut dengan Tap No. V/MPR/1973 bersama dengan pencabutan terhadap beberapa produk MPR lainnya yang dianggap tidak dapat dipakai lagi sebagai peraturan perundang-undangan.

c. Peranan Anggota Legislatif dalam Kehidupan Demokrasi

Anggota legislatif yang ada di parlemen merupakan pengejawantahan dari proses demokrasi yang sudah diselenggarakan melalui pemilu. Anggota legislatif ini sebagai

representasi dari keinginan dan kehendak rakyat Indonesia. Ada beberapa fungsi yang melekat pada anggota legislatif diantaranya sebagai legislasi (pembuat undang-undang), sebagai penetapan anggaran dan sebagai kontroling terhadap eksekutif dalam hal ini pemerintah.

Dalam menjalankan fungsinya anggota legislatif tentunya akan membawa harapan terhadap kehidupan masyarakat yang baik, sejahtera dan berkeadilan. Dalam kehidupan sosial masyarakat ada beberapa persoalan-persoalan sosial yang akan ditampung oleh masing-masing anggota parlemen sesuai dengan partai politik yang mengusungnya. Diantara beberapa mekanisme bagaimana anggota parlemen membawa aspirasinya adalah *pertama*, yaitu dengan hasil keputusan partai sebagai suatu kebijakan partai sesuai dengan *mainstream* atau *ideologi* partai. *Kedua*, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam kehidupan masyarakat, maka anggota legislatif secara langsung turun pada masyarakat untuk menyerap aspirasi baik berupa usulan ataupun pendapat yang biasa dikenal dengan masa *resesi* sebagai kewajiban konstitusi.

Dari begitu besarnya peran dan fungsi anggota legislatif tersebut, ada sebuah anggapan bahwa baik tidaknya sebuah pemerintahnya tergantung pada berfungsinya dengan baik dari anggota parlemennya. Karena sekuat apapun lembaga eksekutifnya (pemerintah) ketika tidak ada penetapan yang baik sesuai dengan proporsinya demi kepentingan rakyat, ataupun tidak adanya pengawasan yang baik terhadap semua kebijakan pemerintah tentu penyelenggaraan negara tidak sesuai dengan harapan rakyat yang semata-mata untuk kemakmuran dan keadilan. Jadi perlu ditegaskan sekali lagi bahwa baik tidaknya penyelenggaraan negara juga sangat tergantung pada berfungsi dan berperanya secara optimal anggota parlemennya.

2. Pengertian Strategi

Menurut Kotler dan Armstrong (2008) Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Menurut Tjiptono dan Chandra (2012) Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang

tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi” bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi sasaran baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perlu mencari kompetensi inti di dalam kegiatan yang dilakukan.

Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong (2008:13) menyebutkan bahwa “Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu kegiatan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya penting untuk mencapai tujuan tersebut”.

Konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Distinctive Competence* : Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan (caleg) agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya.

Suatu perusahaan (caleg) yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh pesaing dipandang sebagai perusahaan (caleg) yang memiliki “*Distinctive Competence*”. *Distinctive Competence* menjelaskan kemampuan spesifik suatu organisasi. Menurut Kotler dan

Armstrong (2008), identifikasi *Distinctive Competence* dalam suatu organisasi meliputi :

1. Keahlian Tenaga Kerja
2. Kemampuan Sumber Daya

Dua faktor tersebut menyebabkan perusahaan ini dapat lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keahlian sumber daya manusia yang tinggi muncul dari kemampuan membentuk fungsi khusus yang lebih efektif dibandingkan dengan pesaing. Misalnya, menghasilkan program yang kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan program pesaing dengan cara memahami secara detail keinginan masyarakat. Dengan memiliki kemampuan melakukan riset yang lebih baik, caleg dapat mengetahui secara tepat semua keinginan masyarakat sehingga dapat menyusun strategi-strategi yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Semua kekuatan tersebut dapat diciptakan melalui penggunaan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki caleg, seperti peralatan dan proses penyampaian program yang canggih, penggunaan jaringan cukup luas, penggunaan sumber daya yang punya keahlian tinggi, dan penciptaan *brand image* positif serta sistem *reverensi* yang terkomputerisasi. Semua itu

merupakan keunggulan-keunggulan yang dapat diciptakan untuk memperoleh kemenangan dan mengalahkan pesaing.

- b. **Competitive Advantage** : Kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya.

Keunggulan bersaing disebabkan oleh pilihan strategi yang dilakukan untuk merebut peluang yang besar. Menurut Porter, ada 3 strategi yang dapat dilakukan untuk memperoleh keunggulan bersaing yaitu :

- Cost Leadership
- Diferensiasi
- Fokus

Caleg juga dapat melakukan strategi diferensi dengan menciptakan persepsi terhadap nilai tertentu pada masyarakat misalnya, persepsi terhadap keunggulan kinerja inovasi produk, pelayanan yang lebih baik, dan *brand image* yang lebih unggul. Selain itu, strategi fokus, juga dapat diterapkan untuk memperoleh keunggulan bersaing sesuai dengan segmentasi dan masyarakat sasaran yang diharapkan.

3. Manfaat Strategi

Menurut Kotler & Armstrong (2008:155) : manfaat dari strategi dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarahkan kegiatan dalam kondisi

persaingan yang selalu berubah agar tercapai tujuan yang diharapkan, adapun dari manfaat strategi yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman yang terarah dalam mengantisipasi dan memanfaatkan peluang yang baik.
- b. Memberikan suatu alternatif dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan yang dilakukan.
- c. Dapat dijadikan cara untuk memenuhi keinginan masyarakat.
- d. Memberikan suatu alternatif untuk meningkatkan persaingan

4. Penyusunan Strategi

Dalam upaya memenangkan persaingan kita harus melakukan strategi baik dibidang bisnis maupun kegiatan lainnya. Dalam penyusunan strategi ada 3 fase yaitu :

- a. Penilaian keperluan penyusunan strategi

Sebelum strategi disusun perlu dilakukan penilaian mengenai perlu tidaknya menyusun strategi. Hal ini terkait apakah strategi yang dilakukan memang sesuai dengan tuntutan perubahan dilingkungan atau sebaliknya.

- b. Analisis Situasi

Pada tahap ini kita perlu melakukan analisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi hal ini

dikenal dengan analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), merupakan analisis mengenai faktor-faktor internal, Opportunities (peluang), Threat (tantangan), analisis ini terkait dengan faktor-faktor eksternal.

5. Pemilihan Strategi

Setelah melakukan analisis internal dan eksternal maka kita melakukan strategi yang akan kita ambil dari tiga alternatif yaitu :

- a. Strategi yang cenderung mengambil resiko (menyerang atau agresif),
- b. Strategi yang cenderung menghindari resiko (bertahan atau defensive)
- c. Strategi yang memadukan antara mengambil resiko dan menghindari resiko (turn-around strategy).

Jika kita memiliki banyak kelebihan dan berhadapan dengan peluang yang tinggi maka strategi yang diambil adalah strategi ofensif atau agresif. Jika kelemahan lebih banyak dimiliki dan berhadapan dengan tantangan yang tinggi maka strategi yang dipilih defensif, jika peluangnya tinggi namun banyak kelemahan atau kekuatan tinggi dan tantangannya juga tinggi maka yang digunakan turn around.

6. Strategi Pemenangan Partai Politik

Sebagai usaha untuk memenangkan dalam setiap penyelenggaraan pemilu ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh partai politik diantaranya adalah ;

- a. Konsolidasi organisasi sampai ke tingkat desa

Peran partai sangat besar pengaruhnya terhadap usaha memenangkan dalam penyelenggaraan pemilu, maka yang harus dilakukan oleh partai adalah menghidupkan struktur partai dari pusat sampai ke tingkat desa sebagai mesin politik partai. Hal demikian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dalam menangkap permasalahan kepartaian.

- b. Membentuk dan mengaktifkan organisasi sayap partai

Salah satu mesin partai politik yang paling berperan adalah sayap partai politik. Dengan adanya sayap partai politik sebagai representasi dari berbagai segmen sosial akan memberikan warna untuk menjelaskan pada masyarakat sesuai segmen sosialnya dalam rangka menginformasi dan mensosialisasikan program-program dan mainstream partai.

- c. Optimalisasi peran dan fungsi DPR, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota, sebagai etalase partai Sesuai dengan

fungsi dan perannya seperti yang telah diuraikan di atas maka integritas dan kredibilitas seorang yang telah duduk dalam kursi parlemen merupakan sebuah tantangan dalam mengemban amanah rakyat melalui partainya, untuk melakukan fungsi legislatif, penetapan anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Jika hal itu dilakukan sesuai fungsi dan perannya maka kinerja pemerintah akan baik, yang semuanya akan kembali kepada kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik.

- d. Responsif terhadap persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Inti dari adanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik adalah ketika sebuah partai politik memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial. Suatu hal yang mungkin dilakukan oleh partai politik adalah adanya responsif terhadap persoalan-persoalan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kepekaan tersebut akan memberikan citra positif bahwa partai politik itu tersebut betul-betul memperhatikan kepentingan rakyat.

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi fokus penelitian yang akan diamati adalah:

- a. Strategi calon legislatif sebagai upaya memenangkan dirinya dalam pemilu legislatif di dapil 2 DPRD Kabupaten Sumenep.
- b. Mengukur kualitas pelaksanaan pemilu legislatif di dapil 2 DPRD Kabupaten sumenep

Jenis data kualitatif diperoleh di lapangan yang dilakukan kepada calon legislative dan tim suksesnya serta para pendukungnya, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil pelaksanaan pemilu legislative 2014

Sumber data primer dilakukan langsung melalui wawancara dengan calon anggota legislative dan masyarakat pemilih, data sekunder diperoleh dari hasil laporan, seminar dan sumber data hasil pelaksanaan pemilu.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: 1. Observasi secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang strategi yang dilakukan oleh calon legislative. 2. Wawancara terstruktur melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait dan calon legislative. 3. Kuesioner yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memilih calon anggota legislatif di wilayah Dapil II pada

pelaksanaan pemilu legislatif. Sampel sumber data yang diambil melalui purposive sampling yaitu sampel yang ditentukan terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis data antara lain :

- a. Deskriptif, adalah analisis dengan memberikan gambaran secara jelas mengenai situasi, usaha dan strategi calon legislatif.
- b. Analisa untuk mengetahui hasil yang dicapai calon anggota legislatif sebagai usaha pemenangan dalam pemilu legislatif.

Adapun tahapan-tahapan analisa yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Analisa sebelum di lapangan
Analisa sebelum di lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.
2. Analisa data di lapangan model Miles and Huberman
Adalah analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu dengan melakukan secara intensif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai.

Analisis data ini antara lain :

- a. Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting.
- b. Data Display (Penyajian Data)
Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah bentuk uraian singkat yang bersifat naratif.
- c. Conclusion Drawing/Verification
Verifikasi dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Daerah pemilihan II (Dapil II) adalah batas-batas wilayah yang dijadikan acuan dalam menentukan daerah pemilihannya. Daerah pemilihan II meliputi kecamatan Gili Genteng, kecamatan Lenteng, kecamatan Saronggi, kecamatan Bluto.

Keadaan Demografi

Sebagian besar wilayah Daerah Pemilihan Dua adalah daerah kering dan pegunungan. Mata pencaharian penduduk kebanyakan sebagai petani, nelayan, buruh, dan sebagian pegawai, iklim tertinggi 34,4 C dan terendah 23,6 C. Jumlah curah hujan terbanyak di bulan Desember dan penyinaran Matahari terlama di bulan Agustus.

Jumlah Penduduk Daerah Pemilihan II

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Gili Genteng	26.524
2.	Lenteng	56.777
3.	Saronggi	34.282
4.	Bluto	45.142
	Jumlah	162.725

Sumber data : Badan Pusat statistik Sumenep

Jumlah Penduduk yang berhak Memilih

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Pemilih (Lk)	Pemilih (Pr)	Jumlah TPS
1.	Gili Genteng	20.761	9.538	11.223	60
2.	Lenteng	48.807	23.123	25.684	160
3.	Saronggi	29.468	13.604	15.864	99
4.	Bluto	37.100	17.728	19372	132
	Jumlah	136.136			

Sumber data : Komisi Pemilihan Umum Sumenep data diolah

Pembagian Wilayah terdiri dari

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Desa
1.	Gili Genteng	26.524	8
2.	Lenteng	56.777	20
3.	Saronggi	34.282	14
4.	Bluto	45.142	20
	Jumlah	162.725	62

Sumber data : Badan Pusat statistik data diolah

Luas Wilayah Daerah Pemilihan II

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Desa	Luas Wilayah (km ²)
1.	Gili Genteng	26.324	8	30,32
2.	Lenteng	56.777	20	71,41
3.	Saronggi	34.282	14	67,71
4.	Bluto	45.142	20	51,25
	Jumlah	162.725	62	120,69

Sumber data : Badan Pusat statistik data diolah

**Jumlah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumenep Dapil II**

No.	Nama Partai	Jumlah
1.	Partai Nasdem	6
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	8
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5
5.	Partai Golongan Karya	8
6.	Partai Gerindra	8
7.	Partai Demokrat	8
8.	Partai Amanat Nasional	8
9.	Partai Persatuan Pembangunan	6
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	8
11.	Partai Bulan Bintang	1
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5
Jumlah		79

Sumber data : Komisi Pemilihan Umum Sumenep data diolah

Perhitungan Perolehan Kursi Daerah Pemilihan II

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai : 106.063

Alokasi Kursi : 8

Angka Bilangan Pembagi Pemilihan : 13.258

No	Partai Politik	Suara Sah	Tahap I			Tahap II		Jml Perolehan Kursi
			Prilhn. Kursi	Sisa Kursi	Sisa Suara	Prkt. sisa suara	Prilhn. Kursi dari Sisa Terbanyak	
1.	NASDEM	1.948	0	5	1.948	9	0	0
2.	PKB	16.678	1		3.420	8	0	1
3.	PKS	7.211	0		7.211	5	1	1
4.	PDIP	13.644	1		386	10	0	1
5.	GOLKAR	8.222	0		8.222	4	1	1
6.	GERINDRA	11.571	0		11.571	2	1	1
7.	DEMOKRAT	18.937	1		5.679	6	0	1
8.	PAN	10.292	0		10.292	3	1	1
9.	PPP	12.654	0		12.654	1	1	1
10.	HANURA	4.330	0		4.330	7	0	0
11.	PBB	214	0		214	12	0	0
12.	PKP	362	0		362	11	0	0
JUMLAH		106.063	3	5	66.289		5	8

Sumber data : Komisi Pemilihan Umum data diolah

Daftar Calon Terpilih di Daerah Pemilihan II Sumenep

No	Partai Politik	No. Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Perolehan Kursi
1.	PKB	1	H.Moh.Ruqi Abdillah,SH	4.968	11
2.	PKS	5	Jubriyanto,S.Pdi	3.893	11
3.	PDIP	5	Ummul Hasanah	6.368	11
4.	GOLKAR	1	A.Fajar Hari Ponto,SH	3.151	11
5.	GERINDRA	4	Jonaidi,SE	5.279	11
6.	DEMOKRAT	1	KH.Kurdi HA,S.Pd	5.040	11
7.	PAN	1	Faisal Muhlis,S.Ag	6.277	11
8.	PPP	1	H.Subaidi,SE.MM	5.320	11

Sumber data : Komisi Pemilihan Umum data diolah

Strategi yang Dilakukan Calon Legislatif

Dapil II

- a. Stategi Persuasif
Strategi ini dilakukan oleh beberapa Caleg dengan melakukan silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah pemilihan II dengan tujuan agar mendapat dukungan dari tokoh masyarakat dan pengikutnya.
- b. Sosialisasi Visi dan Misi
Strategi ini dilakukan oleh caleg dengan cara mengundang masyarakat dengan tujuan memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang visi dan misi serta janji-janjinya apabila nanti terpilih.
- c. Sumbangan Sosial
Sumbangan ini dilakukan oleh beberapa caleg dengan memberikan bantuan kepada pembangunan masjid, langgar, pembangunan jalan di kampung dan lain-lain dengan tujuan agar masyarakat simpati dan memberikan dukungannya.

d. Money Politik

Strategi ini dilakukan oleh hampir semua caleg yang ada di daerah pemilihan II Bahkan setiap caleg bersaing untuk saling memberikan yang lebih banyak. Pemberian uang dilakukan oleh tim suksesnya masing-masing yang terjun langsung ke masyarakat sedangkan jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 20.000 sampai Rp 50.000,- dan di daerah tertentu bahkan sampai Rp 100.000,-

PEMBAHASAN

a. Penilaian Keperluan Penyusunan Strategi

Pemilihan Umum anggota Legislatif adalah pemilihan yang dilakukan dimana masyarakat menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat dipercaya dan bisa membawa aspirasi rakyat untuk diwujudkan dalam program pemerintah. Agar bisa

memenangkan dalam persaingan maka diperlukan strategi yang baik dan tepat.

b. Analisis Situasi

Analisis mengenai kekuatan, kelemahan yang dimiliki calon legislatif serta analisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh setiap calon legislatif, dalam hal ini perlu dipertimbangkan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mempengaruhi masyarakat agar mendapatkan dukungan yang banyak.

c. Penentuan Strategi

Dari analisis SWOT yang dilakukan akan terlihat kekuatan dan kelemahan dari calon legislatif serta peluang dan tantangan yang dihadapi calon maka dari hasil itu akan dapat ditentukan strategi mana yang tepat untuk dilaksanakan.

d. Jumlah Penduduk Daerah Pemilihan II

Daerah Pemilihan II yang terdiri dari 4 kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 162.725 orang ini akan memberi peluang yang besar untuk memenangkan dalam pemilihan calon anggota legislatif.

Jumlah Penduduk yang berhak Memilih

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Pemilih (Lk)	Pemilih (Pr)	Jumlah TPS
1.	Gili Genteng	20.761	9.538	11.223	60
2.	Lenteng	48.807	23.123	25.684	160
3.	Saronggi	29.468	13.604	15.864	99
4.	Bluto	37.100	17.728	19372	132
	Jumlah	136.136			

Sumber data : Komisi Pemilihan Umum Sumenep data diolah

Dilihat dari jumlah penduduk yang mempunyai hak untuk memilih sangat banyak tetapi jumlah yang mencalonkan sebagai anggota legislatif sebanyak 79 orang, sedangkan jumlah suara yang harus diperoleh sebanyak 13.258 suara. Jadi dalam hal ini persaingan sangat ketat sehingga perlu menggunakan strategi yang tepat.

e. Strategi yang Dilakukan Calon Legislatif Dapil II

Strategi yang dilakukan calon anggota legislatif daerah pemilihan II pada

umumnya menggunakan politik uang dengan jumlah nominalnya bervariasi sehingga caleg yang mempunyai uang yang banyak akan lebih banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini tentunya tidak menutup kemungkinan bagi caleg yang melakukan pendekatan secara persuasif dan yang lainnya. Tetapi cara politik uang ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik karena menyalahi aturan yang berlaku. Caleg yang terpilih dengan cara politik uang akan

berpotensi untuk menjadi wakil-wakil rakyat yang tidak amanah (koruptor), dengan maksud untuk menutupi biaya yang sudah dikeluarkan. Sehingga aspirasi masyarakat tidak diperhatikan dan tidak menepati janji-janji yang diucapkan sebelum pemilihan. Jor-joran politik kekuasaan tidak akan menciptakan perimbangan bahkan akan berakibat fatal bagi berbagai pembentukan berbagai kebijakan yang tidak berkualitas. Untuk menuju ke efektifitas dan kualitas demokrasi, maka perlu pembangunan budaya politik Indonesia yang kritis, korektif dan produktif. Sesuai dengan tujuan dan fungsi partai politik maka setiap anggota partai harus berupaya untuk mewujudkan tujuan dan fungsi partai politik.

f. Tujuan Partai Politik

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

g. Fungsi Partai Politik sebagai sarana :

1. Pendidikan bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
4. Partisipasi politik warga Negara Indonesia
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang strategi caleg dalam upaya memenangkan pemilu Legislatif maka dari analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa semua calon anggota legislatif melakukan strategi politik yang bermacam-macam sesuai dengan kemampuannya tetapi ada satu strategi dimana hampir semua calon legislatif melakukan yaitu politik uang. Mereka beranggapan bahwa dengan politik uang ini merupakan senjata yang paling ampuh

untuk mempengaruhi calon pemilih sehingga akan mendapatkan dukungan yang banyak. Kejadian seperti ini melanggar peraturan perundang-undangan anti korupsi, sedangkan dalam beberapa tahun belakangan hal ini sudah bukan rahasia lagi semua orang sudah tahu tetapi tidak ada tindakan dari aparat terkait sehingga politik uang ini selalu terulang lagi pada pemilu berikutnya. Hal ini berpotensi bahwa wakil-wakil yang dipilih nantinya kurang amanah dan kurang memperhatikan aspirasi rakyat.

Calon anggota legislatif pada umumnya tidak melakukan pendekatan secara kekeluargaan, misalnya dengan melibatkan diri pada kegiatan sosial, kemasyarakatan dan lainnya sehingga masyarakat mengenalnya.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka disarankan :

1. Pelaksanaan pemilihan umum harus jujur dan adil sesuai dengan azas Pemilu
2. Setiap orang yang akan mencalonkan hendaknya diberi bekal pendidikan politik sehingga tahu tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota legislatif.
3. Adanya aturan yang jelas tentang larangan money politik serta akibatnya.
4. Anggota Panitia Pengawas Pemilu harus aktif melakukan pengawasan jangan hanya monitoring pada hari pelaksanaannya, hal ini untuk mengurangi money politik.

5. Untuk mempromosikan diri calon legislatif harus aktif di kegiatan sosial, kemasyarakatan sehingga masyarakat simpati dan mendukungnya.
6. Calon legislatif sebaiknya sopan tidak sombong, familiar, jujur dan amanah, mengutamakan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukthie, Fajar (2013), Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, Setara Press, anggota IKAPI Malang.
- Danang, Widoyoko J (2013), Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia, Intrans Publishing (Setara Press) Malang
- Huraerah, Abu (2011) Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan
- Machiavelli, Thucydidas (2005), Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer edisi 2, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- MD, Mahfud (2003) Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Samuel P, Huntington (2004), Tertib Politik, Pada Masyarakat yang Sedang Berubah, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Samuel P, Huntington (2003), Tertib Politik, Ditengah Pergeseran Kepentingan Massa PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Redaksi LP3 ES (2003), Politik Editorial Media Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- Tholkhah, Imam, Azyumardi (2004), Anatomi Konflik Politik di Indonesia, PT.Raja Grafindo Perada, Jakarta